

Evaluasi Program Bantuan Saran Hunian Pariwisata (Homestay) di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai Barat

Maria Kristiana Yuniar^{1*}, Alfred O. Ena Mau², Rouwland A. Benyamin³

¹⁻³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: kristianayuniar13@gmail.com^{1*}, allenamau@gmail.com²,

Rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: kristianayuniar13@gmail.com

Abstract Sarhunta assistance is government financial support for communities in the delineation of handling locations to improve the quality of houses, residential development for business functions, and environmental arrangements to support tourism or economic development. One form of activity is to provide tourism residential facilities (homestay) while improving the quality of settlements that meet the requirements of livable homes. The purpose of this study was to Evaluation of Sarana Hunian Pariwisata (Homestay) Assistance Program in Nampar Macing Village, West Manggarai Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the utilization of Sarhunta as a business function in Nampar Macing Village, Manggarai Regency is not yet optimal. The lack of community understanding and the absence of technical guidance are factors in the failure of Sarhunta utilization.

Keywords: Program Evaluation, Sarhunta, Homestay, Utilization, Livable House.

Abstrak Bantuan Sarhunta adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang berada di delineasi lokasi penanganan untuk peningkatan kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan pariwisata atau perekonomian. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah menyediakan sarana hunian pariwisata (homestay) sekaligus meningkatkan kualitas pemukiman yang memenuhi syarat rumah layak huni. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi Program Bantuan Sarana Hunian Pariwisata di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sarhunta sebagai fungsi usaha di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai barat belum dikatakan optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat serta tidak adanya pembinaan teknis menjadi faktor kegagalan pemanfaatan Sarhunta.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Sarhunta, Homestay, Pemanfaatan. Rumah Layak Huni

1. LATAR BELAKANG

Munculnya Sarana Hunian Pariwisata (sarhunta) bantuan dari Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar layak huni dan menjadi tempat usaha *homestay* di kawasan pariwisata. Program ini, yang dikenal sebagai Sarhunta, bertujuan membantu pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sarhunta adalah program bantuan “bedah rumah” penduduk yang memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hunian mereka dan menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha *homestay* yang dapat menarik wisatawan. Dengan demikian, Sarhunta menjadi sarana hunian pariwisata yang memenuhi persyaratan rumah layak huni dan pariwisata, serta memungkinkan pengunjung untuk menikmati fasilitas *homestay* yang memenuhi standar sarana hunian pariwisata.

Tujuan pengelolaan bantuan adalah mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Petunjuk Teknis Program Bantuan Sarana Hunian Pariwisata SE Nomor 14/SE/Dr/2022). Organisasi penyelenggara kegiatan terdiri atas unsur di tingkat wilayah, provinsi. Dukungan Kementerian PUPR salah satunya dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dengan mendorong pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung Pariwisata atau dikenal juga dengan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta). Tujuan pengelolaan bantuan adalah mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan secara swadaya untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Sagala, 2021).

Pembangunan rumah wisata ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020 yaitu pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata (*homestay*) dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat.

Salah satu desa di Manggarai Barat yang mendapatkan program Sarhunta ini yaitu Desa Nampar Macing, desa yang terletak di sebelah utara Desa Golo Tantong, sebelah Selatan Desa Wae Sano dan Poco Dedeng, sebelah timur Desa Golo Leleng dan sebelah barat Desa Golo Kempo. Masyarakat setempat bertani sebagai mata pencarian utama. Jumlah kepala keluarga di Desa tersebut pada tahun 2020 adalah 540 kepala keluarga. Pada tahun 2020 terdapat 10 kepala keluarga yang mendapatkan program bantuan Sarhunta dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bentuk rumah tidak layak huni di desa ini yaitu rumah yang terbuat dari dinding bambu, lantainya masih tanah atau lantai yang semennya sudah retak parah, atap yang sudah bocor dan masyarakat berpenghasilan dibawah 1 juta yang pada prinsipnya yaitu ekonomi lemah dan Non PNS.

Daya Tarik wisata yang dimiliki oleh desa ini yaitu wisata kerajinan dan wisata alam seperti: Hiking/naik gunung, pertunjukan Tarian Caci, menyaksikan dan melatih anyaman Tikar dan Tenun kain Songke, menganyam topi Re'a (topi yang di buat dari daun pandan berduri), membuat Periuk dari tanah liat, belajar meramu Obat Tradisional, dan menikmati situasi kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini menjadikan desa ini sebagai salah satu lokasi kegiatan fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Direktorat Rumah Swadaya,

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia.

Di Desa Nampar Macing 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan Sarhunta. Ada kepala keluarga yang memanfaatkan Sarhuntanya selain sebagai rumah tinggal tetapi juga aktif fungsi usaha dan tentunya ini memberikan dampak ekonomi bagi penerima program. Sedangkan beberapa masyarakat yang Non aktif guna usaha tidak memanfaatkan Sarhuntanya sebagai fungsi usaha sehingga Sarhunta ini hanya betul-betul sebagai rumah tinggal tanpa adanya fungsi usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan pemerintah untuk mengetahui dengan baik sejauh mana kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola Sarhunta itu sendiri.

Artikel ini memfokuskan pada pemanfaatan hasil program Sarhunta di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi menggunakan indikator Evaluasi Pasca Pelaksanaan (Akbar 2018) yang terdiri dari Relevansi, efektivitas, kemanfaatan dan keberlanjutan. Melalui indikator yang digunakan diharapkan mampu mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan program Sarhunta oleh masyarakat penerima di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai Barat.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi Kebijakan

Menurut Islamy (2004:112) evaluasi merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain pada proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang: isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Bagi Spaulding (Agustino 2017: 183) evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program. Jika demikian, maka evaluasi kebijakan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara ideal melalui melalui cara-cara seperti berikut: (i) mengenal secara pasti masalah atau fenomena yang ada, (ii) menghasilkan alternatif-alternatif pilihan program yang tersedia untuk mengurangi masalah, (iii) melakukan penilaian atas alternatif-alternatif yang tersedia, dan kemudian (iv) mengusulkan agar melaksanakan serta menggunakan pilihan alternatif terbaik untuk mengurangi masalah.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak yaitu evaluasi yang menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat atau lingkungan, baik dampak yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Hasil dari evaluasi dampak ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi Kembali desain kebijakan yang telah diimplementasikan, serta untuk memberikan rekomendasi terkait dengan keberlanjutan atau perubahan kebijakan tersebut di masa yang akan datang.

Outcomes kebijakan biasanya berupa hasil, dampak, atau konsekuensi dari suatu pelaksanaan kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan, outcomes bermanfaat untuk mengetahui apa yang ingin 'diupayakan' atau 'diselesaikan' oleh subjek atau pelaku kebijakan dengan kebijakan yang dikeluarkan (atau dalam bahasa lain disebut sebagai objektivitas kebijakan), bagaimana usaha kita untuk melaksanakannya (program), dan bila ada, apa yang dikerjakan terhadap hasil yang dicapai (dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan tersebut).

Menurut Deni dalam buku Kebijakan Publik (2022:171) Penilaian dampak kebijakan publik merupakan suatu proses penting untuk mengukur dampak dan konsekuensi kebijakan pemerintah dari berbagai sudut pandang, seperti masyarakat, perekonomian, lingkungan hidup dan sektor terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya baik jangka pendek maupun jangka Panjang, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan potensi dampak.

Tujuan Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut Septiana (2023) tujuan dari analisis dampak kebijakan dalam kebijakan publik yaitu Melihat apakah hasil yang diharapkan tercapai/tidak, apakah program tersebut membawa dampak bagi banyak orang, memeriksa apakah dampak yang dihasilkan benar-benar terkait dengan intervensi kebijakan, menyelidiki hal-hal yang tidak terduga, baik efek positif maupun negatif.

Indikator Dampak Kebijakan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan program yang di kutip dari Akbar (2018: 40) sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian Evaluasi Program Bantuan Sarana Hunian Pariwisata (*Homestay*) di Desa Nampar Macing, Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun indikator tersebut yaitu: relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai Barat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan juga analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan. Selanjutnya, dilakukan uji validitas data dengan teknik triangulasi yang terdiri dari triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Petunjuk teknis program Sarhunta menyatakan bahwa pemanfaatan rumah oleh penerima bantuan meliputi penghunian, pemeliharaan, dan pengelolaan sesuai dengan rencana dalam proposal. Pengelolaan rumah dengan fungsi usaha dilakukan dengan mengoperasikan rumah tersebut sesuai jenis usaha yang direncanakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pemanfaatan Sarhunta oleh 10 kepala keluarga penerima program belum optimal. Hal ini terungkap saat peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dan mendapati hanya 5 kepala keluarga yang memanfaatkan Sarhunta sebagai fungsi usaha penginapan (*homestay*).

Salah satu persyaratan calon penerima adalah memiliki komitmen dalam mendukung kegiatan pariwisata atau perekonomian dengan membuat surat pernyataan mengikuti program. Komitmen tersebut mencakup kesediaan untuk berswadaya (khususnya bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rumah dengan fungsi usaha), janji untuk mengoperasikan bangunan yang telah selesai 100% untuk fungsi usaha sesuai rencana selama sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan, dan mengikuti pembinaan pengelolaan usaha pariwisata. Kenyataannya ini tidak sesuai dengan harapan dan tujuan program sebelumnya.

Untuk mengevaluasi pemanfaatan program bantuan Sarana Hunian Pariwisata di Desa Nampar Macing Kabupaten Manggarai Barat, peneliti akan menggunakan indikator evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan yang dikutip dari buku Akbar (2018: 40) yang terdiri dari: relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Relevansi

Relevansi dalam suatu program bertujuan untuk menilai kesesuaian dampak yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia yang meliputi aktor pelaksana program, kebijakan pengelolaan program dan anggaran program sehingga mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), meskipun memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat di sekitar destinasi wisata, menghadapi beberapa tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya relevan dalam memberikan dampak yang diharapkan

- **Aktor Pelaksana Program**

Aktor pelaksana adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program, keterlibatan mereka sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, keterlibatan serta koordinasi antar aktor sangat menentukan keberhasilan program yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi penyelenggara kegiatan terdiri atas unsur di Tingkat wilayah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Ada beberapa aktor yang terlibat langsung dengan masyarakat yaitu Tenaga Ahli Pemberdayaan dan Fasilitator lapangan, serta di fasilitasi dan di dukung oleh pemerintah daerah baik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata Ekonomi kreatif dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa yang merupakan lokasi dari pembangunan program Sarhunta

Minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pemanfaatan mempengaruhi keberlanjutan program. Beberapa hal yang ditemukan oleh peneliti bahwa, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Manggarai Barat hanya satu kali melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan setelah Sarhunta selesai dibangun, dalam pengawasan tersebut ditemukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Sarhunta, akan tetapi tidak ada tindak lanjut terkait penemuan tersebut. Selain itu, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pelatihan kepada masyarakat penerima program terkait pengelolaan Sarhunta sebagai usaha penginapan.

Selain itu, minimnya keterlibatan Pemerintah Desa juga menjadi faktor kegagalan program. Pemerintah Desa adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa keterlibatan mereka, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program menjadi rendah, pemerintah desa memiliki pengetahuan tentang kondisi dan potensi lokal yang nantinya akan memberikan dukungan yang besar kepada masyarakat

penerima program agar menjadikan masyarakatnya sejahtera, namun setelah penetapan calon penerima bantuan, pemerintah desa tidak dilibatkan kembali. Kurangnya koordinasi yang efektif antara pihak terkait dan tidak adanya tupoksi yang jelas terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan pemanfaatan program.

Menurut Kurniawan dalam buku *Audit Kinerja Kebijakan Publik (2023:9)* Adanya integrasi dalam lembaga pelaksana dan antarlembaga pelaksana yang bersifat hierarki. Masing-masing lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan publik, ditingkat pusat maupun daerah, harus dapat melakukan integritas berupa aktivitas koordinasi aktivitas satu sama lain dalam sebuah hierarki tertentu. Koordinasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah akan memungkinkan sebuah kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi yang terjadi, ketika peneliti melakukan wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Perumahan, mereka mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan pemanfaatan rumah adalah Dinas Pariwisata, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata yang menurut mereka, tidak ada penugasan secara khusus untuk Dinas Pariwisata. Hal ini tentunya menyebabkan kebingungan dan inefisiensi yang tentunya berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keberlanjutan pemanfaatan Sarhunta.

- **Kebijakan Pengelolaan Program**

Tujuan program bantuan Sarhunta sebenarnya sangat bagus, masyarakat akan memperoleh dampak ganda, yaitu dampak terhadap kualitas hidup dan dampak terhadap ekonomi. Tetapi dampak tersebut belum maksimal, masyarakat kurang melihat peluang tersebut, padahal jika kita merujuk pada Petunjuk Teknis, program Sarhunta bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya untuk mendorong Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Tetapi kebijakan pengelolaan pemanfaatan Sarhunta tidak dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pengelolaan Sarhunta pasca pembangunan dirancang untuk menjamin keberlanjutan dan optimalisasi manfaat program bagi masyarakat penerima. Fokus utama kebijakan ini adalah pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan.

Menurut Juknis Program Bantuan Sarhunta: Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan rumah dan lingkungan oleh penerima bantuan, Balai Pelaksana Penyediaan Pemanfaatan melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi terkait. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sarhunta. Pendampingan ini meliputi pelatihan berkelanjutan dalam bidang manajemen usaha, pelayanan kepada tamu, pemasaran dan pengembangan produk wisata. Namun, yang ditemukan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pendampingan melalui pelatihan kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap asas pemanfaatan hanya dilakukan sekali saja pasca pembangunan. Dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya dinamika pemanfaatan oleh masyarakat. Dari temuan yang ada, tidak menunjukkan adanya tidak lanjut dari penemuan dinamika pemanfaatan tersebut. Tidak adanya pelatihan yang dilakukan mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengelola Sarhunta secara efektif. Ketidakterlibatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya akan menghambat potensi Sarhunta sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengembangkan pariwisata lokal.

- **Anggaran Program**

Anggaran program adalah rencana keuangan yang merinci alokasi dana dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Menurut Juknis Program Sarhunta: Besaran bantuan kegiatan Sarhunta untuk meningkatkan kualitas rumah diberikan berdasarkan nilai satuan per unit rumah. Besaran bantuan untuk penataan lingkungan perumahan dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran. Anggaran yang digunakan dalam pembangunan Sarhunta bersumber dari APBN dengan nominal Rp.114.000.000/unit setelah dilakukan rincian Standar Harga Satuan Daerah (SHS). Adapun biaya per unit rumah digunakan untuk membeli bahan material bangunan dan biaya para tukang bangunan fisik dari rumah Sarhunta serta beberapa fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan para calon penerima bantuan seperti: meteran listrik, bak air, fiber air, dan sanyo air.

Dari anggaran yang besar tersebut, nampak masyarakat yang sejahtera, rumah layak huni tersebut menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman, masyarakat sudah tidak mengkhawatirkan kondisi tempat tinggal mereka lagi. Meskipun sudah memberikan rumah layak huni, pemanfaatan Sarhunta masih belum optimal dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat penerima. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami kebijakan dan mekanisme penyaluran dana bantuan, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya laporan yang diberitahukan secara jelas kepada masyarakat penerima

setelah selesainya pembangunan untuk mengetahui kurang atau lebihnya dari dana yang digunakan.

Efektivitas

Menurut Annas (2017:75) Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakanya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya, apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Program Sarhunta masih dikatakan belum efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun Sarhunta sudah mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat, namun masyarakat belum mampu mendukung Kawasan Strategi Pariwisata Nasional melalui pemanfaatan Sarhunta sebagai fungsi usaha.

Efektifitas program Sarhunta sangat tergantung pada kualitas sosialisasi, pembinaan masyarakat, dan pengawasan. Dengan sosialisasi yang efektif, masyarakat akan memahami dan berpartisipasi dalam program ini. Dengan pembinaan yang tepat, masyarakat akan memiliki kapasitas untuk mengelola *homestay* dan usaha lainnya. Dan dengan pengawasan yang ketat, program Sarhunta akan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan.

- **Sosialisasi Pemanfaatan**

Sosialisasi pemanfaatan adalah penyampaian informasi penting kepada masyarakat atau kelompok penerima bantuan terkait tujuan, manfaat dan dampak dari program dilaksanakan. Adapun tujuan dari sosialisasi agar memberikan pemahaman serta menumbukan semangat masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengikuti program tersebut. Dalam proses penyampaian sosialisasi, kemampuan para aktor pelaksana sangat penting dalam menentukan keberhasilan sosialisasi, masyarakat cenderung lebih percaya dan menerima informasi yang disampaikan oleh orang atau lembaga yang mereka hormati. Peran aktor dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat harus secara terperinci sehingga mampu mempengaruhi masyarakat. Dengan ini apa yang disampaikan betul-betul dipahami oleh masyarakat itu sendiri

Masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan program Sarhunta, sehingga mereka kurang berpartisipasi. Sosialisasi yang dilakukan pun hanya dilakukan pada awal persiapan pelaksanaan program kepada masyarakat, setelah Sarhunta selesai dibangun, tidak ada pelaksanaan sosialisasi kembali. Kurangnya sosialisasi lebih lanjut, menyebabkan masyarakat kurang terdorong untuk memanfaatkan Sarhunta. Hal ini bisa

menjadi faktor masyarakat enggan memanfaatkan Sarhunta sebagai fungsi usaha, karena tidak adanya penegasan lebih lanjut, sehingga masyarakat berpikir bahwa informasi dalam sosialisasi hanya sekedar himbauan bukan suatu keharusan.

- **Pembinaan Masyarakat Penerima**

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu. Pembinaan yang dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah penerima program hanya dilakukan pada saat pelaksanaan pembangun Sarhunta berlangsung, setelah itu tidak ada pembinaan lagi. Pembinaan yang diberikan hanya bentuk himbaun, pembentukan pola pikir dan mentalitas dari masyarakat penerima, bahwa setelah Sarhunta ini dibangun, mereka harus bisa memanfaatkannya sebagai fungsi usaha, yang tentunya sebatas himbauan sangat tidak cukup. Masyarakat mungkin paham bahwa Sarhunta ini harus difungsi usahakan, akan tetapi mereka berada dalam kebingungan untuk mengelolah Sarhunta sebagai fungsi usaha. Pemerintah daerah juga tidak ada tindakan lebih lanjut terkait dengan pembinaan kepada masyarakat, bila merujuk pada Petunjuk Teknis, seharusnya pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan untuk menjamin rumah serta lingkungan dihuni, dipelihara, dan dikelola sesuai peruntukan oleh penerima bantuan, salah satunya melalui keikutsertaan penerima bantuan dalam kelompok sadar wisata.

Ketidakjelasan terkait pengelolaan keberlanjutan program Sarhunta, serta kurangnya persiapan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola Sarhunta sebagai fungsi usaha pariwisata, menjadi faktor yang dapat menghambat pemanfaatan program secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan keberlanjutan program secara nasional, yang dapat berdampak pada kurangnya semangat masyarakat dalam memanfaatkan Sarhunta sebagai fungsi usaha. Penemuan ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizal Kurniansah, dkk, dengan judul penelitian *Dinamika Pengelolaan Sarhunta Oleh Masyarakat Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah-Indonensia*. Hasil penelitian menunjukkan, keterampilan masyarakat sebelum mendapatkan bantuan program Sarhunta dari pemerintah, masyarakat tidak memiliki keterampilan sama sekali dalam mengelola tempat tinggal (Sarhunta). Namun

setelah mendapatkan bantuan, masyarakat memiliki keterampilan tersebut karena telah mendapatkan beberapa pelatihan dari stakeholder terkait. Hal ini bisa menjadi contoh adanya perubahan partisipasi masyarakat penerima program, untuk itu perlunya dilakukan pelatihan secara teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka.

- **Pengawasan Program**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Sarhunta melibatkan berbagai aktor dengan peran dan tujuan yang berbeda, namun saling terkait. Peran aktor dalam pengawasan berbeda-beda ada yang melakukan pengawasan terhadap, proses pembangunan fisik Sarhunta untuk memastikan kualitas bangunan memenuhi standar yang telah ditetapkan, memastikan pembangunan Sarhunta sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, memastikan tidak adanya penyimpangan dan penyelewengan penggunaan anggaran program dalam pengadaan bahan material bangunan dan diakhiri dengan asas pemanfaatan. Tujuan agar memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Analisis menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan Sarhunta oleh Dinas Perumahan Kabupaten sangat minim. Pengawasan hanya dilakukan satu kali pada awal program. Hasil pengawasan tersebut ditemukan adanya pergeseran fungsi Sarhunta, dimana masyarakat cenderung memanfaatkannya sebagai rumah tinggal biasa, bukan sebagai sarana pendukung pariwisata. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait mengenai program ini. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pemanfaatan Sarhunta. Pengawasan yang dilakukan sekali tidak memadai untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal dan memberi dampak yang diharapkan.

Ketidakjelasan terkait pengelolaan keberlanjutan dari program Sarhunta dapat berujung pada kegagalan pemanfaatan program sebagai pendukung Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merencanakan keberlanjutan program Sarhunta dengan matang, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola Sarhunta secara mandiri.

Kemanfaatan

Dalam konteks suatu program, kemanfaatan merujuk pada dampak positif atau nilai tambah yang dihasilkan oleh program bagi penerima manfaat. Program Sarhunta sudah menunjukkan kemanfaatan yang baik melalui dampak kesejahteraan masyarakat yang

diperoleh dari peningkatan kualitas rumah. Kemanfaatan program harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Program yang berhasil adalah program yang mampu memberikan manfaat yang signifikan dan relevan dengan tujuan awal. Untuk mengetahui apakah program berhasil memberikan kemanfaatan, perlu dilakukan pengukuran secara sistematis. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan sub fokus kondisi bangunan Sarhunta, pemahaman masyarakat penerima dan pengelolaan Sarhunta oleh masyarakat.

- **Kondisi Bangunan Sarhunta**

Kondisi bangunan yaitu keadaan fisik dari suatu bangunan pada waktu tertentu. Kondisi bangunan yang bagus juga sangat erat kaitannya dengan peran serta tanggung jawab dari aktor yang terlibat dalam proses pembangunan, bangunan fisik yang bagus tergantung dari konstruksi dan kualitas bahan yang digunakan. Sehingga dapat dipastikan bahwa bangunan aman, nyaman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup, mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan dan kualitas bangunan yang bagus juga bisa menjadi pendorong serta semangat untuk menjadikan Sarhunta sebagai fungsi usaha.

Kondisi bangunan Sarhunta di Desa Nampar Macing secara keseluruhan dapat dikatakan sangat baik dan kokoh menciptakan rumah yang layak huni bagi pemiliknya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya, Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Menurut Buku Rumah Layak Huni (2017) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan dan Direktorat Rumah Swadaya, syarat rumah layak huni terdiri dari beberapa indikator.

Berdasarkan indikator yang ada diketahui bahwa kualitas konstruksi yang baik serta penggunaan material yang tepat dalam pembangunan rumah Sarhunta sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat penerima. Adanya bantuan Sarhunta menciptakan masyarakat yang sejahtera. Meskipun demikian, peneliti menemukan adanya beberapa rumah yang mengalami masalah pada catnya, yaitu luntur. Kondisi ini membutuhkan adanya perhatian lebih lanjut terkait pemilihan jenis cat yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, serta perlu edukasi dan kesadaran dari pada masyarakat mengenai pemeliharaan bangunan, termasuk pengecatan ulang secara berkala agar mempercantik tampilan dari rumah Sarhunta sehingga bisa menarik

wisatawan untuk mau menginap. Berdasarkan pengamatan peneliti faktor-faktor tersebut diakibatkan oleh cuaca yang ekstrem, kelembapan dan paparan sinar matahari penyebab luntunya cat pada rumah Sarhunta.

Selain kondisi fisik bangunan yang bagus, terdapat fasilitas tambahan yang diberikan oleh pemerintah antara lain: meteran listrik, fiber air, bak air dan sanyo air. Fasilitas yang diberikan mendukung kelayakan dari rumah Sarhunta yang dibangun. Menurut Buku Rumah Layak Huni dari kementerian PUPR, manfaat rumah layak huni adalah terlihat indah, memberikan kenyamanan bagi penghuni, penghuni menjadi sehat, menjadikan keluarga betah dirumah dan tamu senang berkunjung. Hal ini dapat dikatakan bahwa program Sarhunta di desa tersebut telah berhasil mewujudkan hunian yang layak untuk dijadikan usaha penginapan bagi wisatawan.

- **Pemahaman Masyarakat Penerima**

Pemahaman masyarakat penerima mengacu pada tingkat pengertian, dan interpretasi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau penerima manfaat dari suatu program. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentunya lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan mampu mengembangkan keterampilan yang dimiliki agar bisa bernilai jual. Sebaliknya, jika pemahaman masyarakat kurang, program tersebut mungkin tidak efektif. Meskipun kondisi fisik Sarhunta dalam keadaan baik, pemanfaatannya belum optimal. Masyarakat penerima program Sarhunta, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Sarhunta sebagai usaha penginapan. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat memahami bahwa tujuan program Sarhunta bukan hanya untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni, melainkan juga mendorong partisipasi mereka dalam mendukung kawasan pariwisata sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Kendati demikian, mereka terkendala oleh kurangnya pemahaman teknis terkait cara memperoleh tamu, melayani tamu, dan menciptakan kreativitas yang bernilai jual.

Bila merujuk pada Juknis Program Bantuan Sarhunta, salah satu persyaratan masyarakat penerima program adalah : Berkomitmen dalam mendukung kegiatan pariwisata atau perekonomian dengan membuat surat pernyataan mengikuti program. Komitmen mengikuti program antara lain: (a) Bersedia untuk ber-swadaya khususnya bagi penerima bantuan peningkatan kualitas rumah dengan fungsi usaha; (b) Bersedia memelihara rumah dan lingkungan yang telah mendapatkan bantuan; (c) Berjanji memfungsikan bangunan yang telah selesai 100% untuk fungsi usaha sesuai dengan

rencana selama sekurang- kurangnya 10 tahun ke depan; (d) Taat dan patuh terhadap isi dokumen proposal dan masukan/saran tenaga pendamping; (e) Membentuk kelompok dan bertanggung jawab secara tanggung renteng; dan (f) Mengikuti pembinaan pengelolaan usaha pariwisata;

Dalam konteks masyarakat yang tidak memanfaatkan Sarhunta sebagai fungsi usaha, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen yang dinyatakan dengan implementasi di lapangan. Masyarakat yang tidak menjalankan Sarhunta sebagai usaha penginapan, misalnya, tidak memenuhi poin ketiga dari komitmen tersebut. Ketidapatuhan ini menurut peneliti disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan keterampilan atau perubahan prioritas masyarakat. Apabila dibandingkan dengan masyarakat yang memanfaatkan Sarhunta, kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak aktif dalam fungsi usaha serupa dengan kendala yang dialami oleh masyarakat yang aktif. Namun, masyarakat yang aktif tetap termotivasi untuk memulai dan mencoba, sehingga mereka tidak menganggap kendala tersebut sebagai penghalang. Pada dasarnya, pemanfaatan Sarhunta bersifat fleksibel, pemilik Sarhunta tidak harus fokus sepenuhnya pada usaha tersebut dan tetap menjalankan pekerjaan utama mereka sebagai petani. Selain itu, usaha ini tidak memerlukan modal yang besar. Prinsip utama homestay atau penginapan adalah menonjolkan kearifan lokal, sehingga pemilik rumah dapat menawarkan apa yang mereka miliki kepada wisatawan.

Perbandingan kedua kelompok ini mengungkapkan bahwa Sarhunta tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas (Ramadhani, 2020).

Dalam sebuah penelitian tentang yang dilakukan oleh Delmira Syafrini, dkk, dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Homestay Berbasis Komunitas Lokal Di Desa Wisata Nagari Sungai Pinang Pesisir Selatan Sumatra Barat. Latarbelakang pemberdayaan didasari adanya masalah dalam pengelolaan penginapan milik masyarakat belum sesuai dengan konsep penginapan yang layak untuk wisatawan baik dari segi fisik bangunan maupun sikap masyarakat

yang belum mampu berkomunikasi dengan baik dengan tamu, yang menunjukkan kemampuan pelayanan juga masih bermasalah. Hasil kegiatan pemberdayaan menunjukkan adanya dampak positif pada peningkatan pengetahuan, motivasi dan persepsi masyarakat, diantaranya: 1) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang urgensi homestay, 2) peningkatan motivasi peserta dalam mengelola rumah tinggal menjadi homestay, 3) peningkatan pengetahuan peserta dalam penataan homestay dan pelayanan tamu (Syafri et al., 2022). Ini menunjukkan pemberdayaan dan pengawasan sangat penting untuk membantu masyarakat memanfaatkan potensi ekonomi dari program Sarhunta. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang potensi pariwisata dan cara mengelola homestay perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif.

- **Pengelolaan Sarhunta Oleh Masyarakat**

Program Sarhunta atau Sarana Hunian Pariwisata, merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kawasan wisata agar layak huni dan dapat dimanfaatkan sebagai homestay atau penginapan. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan secara ekonomi melalui sektor pariwisata. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam mendukung kawasan Strategi Pariwisata Nasional.

Di Desa Nampar Macing adalah terdapat perbedaan utama antara kedua kelompok yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Masyarakat yang berpartisipasi melihat Sarhunta sebagai peluang dalam menambah pendapatan dari pendapatan utama sebagai petani. Sementara itu, masyarakat yang tidak berpartisipasi menghadapi berbagai kendala yang membuat mereka sulit atau tidak mampu untuk memanfaatkan Sarhunta sebagai homestay. Pengelolaan Sarhunta sebagai homestay oleh masyarakat yang berpartisipasi sangat bagus, berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat 1 kamar yang disewakan untuk di tempati oleh wisatawan dengan kondisi kamar yang bersih dan tersedia bantal dengan sarungnya, sprei dan kelambu serta dilengkapi dengan kunci kamar, lemari ukuran sedang, meja, kursi, vas bunga, asbak, kipas angin, tempat sampah, handuk untuk tamu selain itu terdapat papan usaha yang di pajang di depan rumah Sarhunta yang memungkinkan wisatawan mengetahui adanya usaha penginapan tersebut. Ini menunjukkan adanya swadaya masyarakat dalam mendorong kawasan pariwisata yang tentunya akan berdampak terhadap ekonomi mereka.

Dukungan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk membantu masyarakat mengatasi hambatan dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Berdasarkan temuan peneliti, masyarakat yang memanfaatkan Sarhunta ini, memiliki keterbatasan

pengetahuan dalam mengelolah Sarhunta dan fasilitas yang masih terbatas serta bentuk promosi yang belum maksimal, sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung pun tidak tetap setiap bulannya. Dengan demikian, program Sarhunta perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta memberikan dukungan yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan secara jangka panjang.

Disisi lain, kelompok tidak berpartisipasi yang terdiri dari 5 kepala keluarga menunjukkan hambatan yang signifikan. Mereka merasa kurang siap dan percaya diri untuk menerima tamu, terutama karena keterbatasan keterampilan komunikasi, khususnya bahasa Inggris, dan kurangnya ide kreatif untuk menarik wisatawan. Beberapa diantara mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang cara memanfaatkan Sarhunta, dan membutuhkan lebih banyak dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Faktor usia dan mentalitas juga berperan dalam menghambat partisipasi mereka. Mereka merasa tidak tahu cara menarik tamu dan kurang siap untuk berinteraksi dengan orang asing.

Keberlanjutan

Keberlanjutan program Sarhunta adalah kondisi dimana program dapat terus berjalan dan memberikan manfaat secara jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Keberlanjutan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, program Sarhunta dapat dijadikan sarana untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui pelestarian budaya dan tradisi lokal, program Sarhunta harus mampu memberikan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang mengelola *homestay*, serta mengelola *homestay* dapat mengubah rutinitas sehari-hari, mereka mungkin perlu lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan. Dalam menilai keberlanjutan program Sarhunta terdapat beberapa sub fokus yang meliputi pemanfaatan Sarhunta oleh wisatawan, perubahan sosial dan peningkatan ekonomi.

- **Pemanfaatan Sarhunta Oleh Wisatawan**

Pemanfaatan Sarhunta oleh wisatawan mengacu pada bagaimana wisatawan menggunakan dan berinteraksi dengan fasilitas Sarhunta yang disediakan selama mereka tinggal atau berkunjung di suatu daerah. Pemanfaatan Sarhunta oleh wisatawan sebagai acuan dari keberhasilan program Sarhunta dalam mendukung Kawasan Strategi Pariwisata Nasional serta mendukung perekonomian masyarakat setempat. Keberhasilan program Sarhunta dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung karena mempermudah mereka dalam mengakses kebutuhan akomodasi. Di

desa Nampar Macing, beberapa masyarakat sudah mampu memanfaatkan homestay Sarhunta untuk memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada wisatawan, seperti melalui makanan tradisional, kerajinan tangan, atau pertunjukan seni. Hal ini tentunya dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal desa tersebut, sekaligus menarik lebih banyak wisatawan.

Berdasarkan analisis, ini menunjukkan bahwa program Sarhunta sudah menunjukkan dampak yang cukup baik dari hasil dan keluaran yang dicapai. Secara keseluruhan, pemanfaatan homestay Sarhunta sebagai sarana promosi budaya lokal telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata Desa Nampar Macing. Hal ini menunjukkan bahwa program Sarhunta tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata budaya berkelanjutan, ini menunjukkan masyarakat secara swadaya mendukung Kawasan Strategi Pariwisata Nasional.

Uniknya, wisatawan yang datang ke Desa tersebut sangat mau belajar kehidupan masyarakat lokal, fasilitas yang disediakan oleh masyarakat penerima program juga seadanya, seperti tempat tidur, meja dan kursi, kasur yang digunakan adalah kasur dari kapuk, makanan yang disediakan juga makanan yang dikonsumsi hari-hari oleh masyarakat. Mereka yang biasa menginap adalah wisatawan yang cape perjalanan jauh, wisatawan yang memang secara khusus mau datang ke desa untuk belajar hal-hal baru, dan wisatawan yang mau melakukan hiking ke gunung dan ketika mereka lelah mereka membutuhkan penginapan. Desa Nampar Macing sangat memiliki potensi wisata yang bagus, pemerintah sudah memberikan sarana dalam bentuk program Sarhunta agar bisa mendukung potensi tersebut. Melalui pemanfaatan Sarhunta, masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga berhasil memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada wisatawan. Pengelolaan Sarhunta oleh masyarakat juga sangat bagus, ini bisa membuat wisatawan tertarik dan merasa nyaman.

- **Perubahan Sosial**

Perubahan sosial mengacu pada proses transformasi yang mempengaruhi masyarakat berinteraksi dan berperilaku. Perubahan ini bisa terjadi secara perlahan atau cepat. Perubahan sosial yang terjadi di Desa Nampar Macing setelah mengetahui potensi ekonomi dari kerajinan, jasa pemandu dan sewa penginapan bagi wisatawan, padahal sebelumnya mereka hanya fokus pada pertanian, adalah sebuah transformasi menarik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian utama, mulai melirik sektor

pariwisata sebagai sumber pendapatan baru. Potensi pariwisata memicu munculnya wirausaha-wirausaha baru di desa. Masyarakat mulai berkreasi menciptakan produk kerajinan yang menarik bagi wisatawan dan menawarkan jasa penginapan.

Adapun penemuan peneliti, ternyata ada 3 kepala keluarga dari 5 kepala keluarga yang mau memanfaatkan Sarhuntanya adalah masyarakat yang memang dari dulu sudah membuka usaha penginapan yang sederhana, sebelum hadirnya program Sarhunta sebagai pendukung usaha masyarakat Desa Nampar Macing, dan keterampilan yang diperolehpun melalui pelatihan yang pernah mereka ikuti sejak tahun 2002 di Desa Nampar Macing yang diselenggarakan oleh seorang dari Australia yang bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa, besarnya pengaruh dari pelatihan yang dilakukan sehingga mendorong mereka untuk membuka usaha penginapan. Saat ini telah muncul jasa-jasa pendukung pariwisata lainnya mulai berkembang di desa Nampar Macing seperti, ada masyarakat yang membuka usaha kuliner yang menyajikan menu-menu lokal. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, yang semakin terbuka terhadap peluang ekonomi baru di sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dari sektor pariwisata terhadap masyarakat yang bisa melihat peluang.

- **Peningkatan Ekonomi**

Usaha pariwisata bisa dijadikan pendapatan sampingan dari pendapatan utama sebagai petani, seperti yang dialami oleh masyarakat desa Nampar Macing. Peningkatan ekonomi tidak hanya datang dari usaha pertanian tetapi juga usaha pariwisata, ada berbagai hal yang bisa ditawarkan agar bisa bernilai jual. Masyarakat Desa Nampar Macing, sudah melihat peluang ini sudah sejak dahulu. Setelah adanya program Sarhunta, semangat masyarakat semakin didorong. Banyak masyarakat sekitar menyadari adanya peluang yang bisa dilakukan, menurut masyarakat setempat, usaha pariwisata ini tidak mempengaruhi pekerjaan utama mereka sebagai petani, serta tidak mengharuskan modal yang besar, mereka hanya menawarkan apa yang mereka punya dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Program bantuan Sarhunta sudah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Sebelumnya, pendapatan masyarakat Desa Nampar Macing hanya mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber pendapatan utama, yang mana penghasilan dari bertani itu hanya didapatkan setiap tiga bulan sekali pada saat panen tiba. Namun, dengan adanya program Sarhunta, mereka memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui usaha penginapan. Sebelum adanya

program ini, penghasilan masyarakat dari hasil panen berkisar antara Rp.1.000.000 hingga Rp. 2.000.000 setiap tiga bulan. Jumlah tersebut seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak. Namun, semenjak mereka memulai usaha penginapan Sarhunta, mereka punya mendapatkan tambahan setiap bulannya dari sewa menginap. Rata-rata dalam sebulan ada 3-4 tamu yang menginap selama dua malam. Tarif sewa penginapan berbeda-beda dari setiap masyarakat, mulai dari Rp. 150.000/orang, 170/orang, 250/orang dan itu belum termasuk pendapatan tambahan dari jasa atau kerajinan yang ditawarkan kepada wisatawan. Bila dikalkulasikan sewa menginap Rp. 150.000/orang, tamu menginap dalam 1 bulan rata-rata 4 orang wisatawan dan lama menginap 2 malam, jika dikalikan maka, setiap wisatawan harus membayar sewa menginap $Rp.300.000 \times 4 = Rp. 1.200.000$ (1 bulan) dan bila ditotal selama 3 bulan, maka pendapatan masyarakat dapat mencapai Rp. 3.600.000 (3 bulan). Pendapatan tambahan dari usaha penginapan ini sangat membantu masyarakat, terutama karena dapat menutupi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh hasil pertanian mereka. Kehadiran program Sarhunta sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memberikan stabilitas ekonomi lebih baik.

Temuan yang sama dalam penelitian Nurmala Dewi tentang Dampak Pengelolaan Homestay Terhadap Masyarakat Desa Tetebantu Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila sebelumnya masyarakat desa hanya mengandalkan hasil pertanian, maka dengan keberadaan desa wisata dan membangun akomodasi, seperti homesay tersebut, masyarakat dapat bekerja sebagai pelaku utama wisata yang dapat menambah pendapatannya, selain itu dampak ekonomi juga bisa dilihat dari peningkatan penjualan produk lokal seperti kopi Sangkaraeng, sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga desa (Nurmala Dewi & Darmaesti, 2023).

Tetapi sayangnya dampak ekonomi ini hanya dirasakan oleh masyarakat yang memanfaatkan Sarhunta, sedangkan masyarakat yang belum memanfaatkan, masih dalam keadaan ketidakberdayaan karena tidak percaya diri dalam memulai usaha. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk mencari tahu dan mencari solusi bagaimana agar bisa mendorong semangat masyarakat, seperti beberapa masyarakat yang aktif fungsi usaha, karena bila di pahami, kendala yang dihadapi oleh beberapa masyarakat non-aktif fungsi usaha, sama seperti yang dialami oleh masyarakat aktif fungsi usaha, tetapi itu tidak dijadikan sebagai penghalang bagi mereka. Diharapkan bantuan ini perlu adanya pelatihan keberlanjutan terkait pemanfaatan, sehingga

dampaknya dirasakan oleh semua penerima bantuan dan mungkin bisa memberikan dampak pada masyarakat yang lain.

5. KESIMPULAN

Program Sarhunta awal mulanya bertujuan untuk mendukung Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) melalui peningkatan rumah layak huni di lokasi sentral pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai fungsi usaha. Meskipun di Desa Nampar Macing sudah menunjukkan dampak terhadap kualitas rumah layak huni, program Sarhunta belum dikatakan berhasil karena masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam memanfaatkan Sarhunta sebagai fungsi usaha. Masyarakat mungkin sudah memperoleh rumah layak huni, namun belum sepenuhnya mendukung KSPN melalui pemanfaatan Sarhunta sebagai fungsi usaha. Sehingga apa yang menjadi tujuan program belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang lebih matang oleh pemerintah untuk memastikan program Sarhunta mencapai tujuannya. Pemberian pelatihan secara teknis kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Sarhunta sebagai usaha penginapan (*homestay*) sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program Sarhunta.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Muh Firyal., Widya Kurniati Mohi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.
- Annas, Aswar (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Deni, Asep. (2022). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Dan Analisis)* Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Islamy, M.Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Ardeno., Iwan Novarian Sutawijaya. (2023). *Audit Kinerja Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Anggota IKAPI.
- Mustanir, Ahmad. Dkk. (2019). *Pembangunan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Nurmala Dewi, & Darmaesti. (2023). Dampak Pengelolaan Homestay Terhadap Masyarakat Di Desa Wisata Tetebatu Lombok Timur. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 4(1), 23–33. <https://doi.org/10.53565/sabbhatayatra.v4i1.699>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, Bantuan Sarana Hunian Pariwisata Lampiran III Sarhunta SE Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022.

Ramadhani, M. (2020). Pembinaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. *EPrints UNISKA Respository Universitas Islam Kalimantan*, 1–23. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3564>

Rizal Kurniansah, M., & Hakim, J. (2024). *DINAMIKA PENGELOLAAN SARHUNTA OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN EKONOMI KHUSUSMANDALIKA LOMBOK TENGAH-INDONESIA*. 18(8), 1–12.

Rumah Layak Huni (2017) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan dan Direktorat Rumah Swadaya.

Sagala, P. (2021). Perencanaan Sarana Hunian Pariwisata (Homestay) Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, Desa Lumban Gaol, Kabupaten Toba Samosir – Sumut. *Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, 1(2), 12–18.

Septiana, Anis Ribcalia. Dkk. (2023), *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, Dan Aplikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafrini, D., Nurlizawati, N., & Amelia, L. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Homestay Berbasis Komunitas Lokal di Desa Wisata Nagari Sungai Pinang, Pesisir Selatan Sumatera Barat. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 459–464. <https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.397>